

Kesesuaian Lahan Permukiman di Wilayah Pesisir Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar

Ananda Lola Syam^{1)*}, Shirley Wunas²⁾, Wiwik Wahidah Osman³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: anandalolas@gmail.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: shirly_wunas@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: w_wahidahosman@yahoo.com

ABSTRACT

Rapid population growth can cause problems related to the availability of land for settlements. Demand of the population which is greatly increased tends to ignore the designation and capability of existing land. Land use for settlements is regulated in regional spatial plans, taking into account the balance of physical and ecological aspects. The purpose of this study is to determine the suitability level of settlement land and formulate the principles of settlement development. Data collection methods used are, observation, questionnaire and literature study. The analytical method used is Analytical Hierarchy Process (AHP), spatial analysis, and descriptive analysis. Land suitability is seen through several aspects, namely slope, soil type, beach border, abrasion prone, fishing facilities, availability of clean water, accessibility, river border and land availability. The results of this study indicate that land is 110 Ha, which is 939 Ha, and 493 Ha. The suitability of the land to the appropriate category means that this land is suitable to be developed as a residential area with a high score for all aspects. The appropriate land classification is vacant land and shrubs. Land suitability with the category is quite appropriate, it means that special consideration is needed in the development of settlements. While the land suitability with the category does not match, it means that the development of residential areas can be carried out with a touch of technology, however, it must still be prioritized as a protected area. Most of the land with inappropriate categories is coastal border, river border and abrasion prone areas.

Keywords: Land Suitability, Settlement, Coastal, Analytical Hierarchy Process (AHP), Takalar Regency

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang kian pesat dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan ketersediaan lahan untuk permukiman. Permintaan penduduk yang sangat meningkat cenderung mengabaikan peruntukkan dan kemampuan lahan yang ada. Pemanfaatan lahan untuk permukiman diatur dalam rencana tata ruang wilayah, dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek fisik dan ekologi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan permukiman dan menyusun prinsip-prinsip pengembangan permukiman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, kuesioner dan studi literatur. Metode Analisis yang digunakan yaitu, *Analytical Hierarchy Process* (AHP), analisis spasial, dan analisis deskriptif. Kesesuaian lahan dilihat melalui beberapa aspek yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, sempadan pantai, rawan abrasi, sarana nelayan, ketersediaan air bersih, aksesibilitas, sempadan sungai dan ketersediaan lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan lahan yang sesuai 110 Ha, cukup sesuai 939 Ha, dan tidak sesuai 493 Ha. Kesesuaian lahan dengan kategori sesuai artinya, lahan ini cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman dengan skor tinggi untuk semua aspek. Klasifikasi lahan sesuai yaitu lahan kosong dan belukar. Kesesuaian lahan dengan kategori cukup sesuai artinya dibutuhkan pertimbangan khusus pengembangan permukiman. Sedangkan kesesuaian lahan dengan kategori tidak sesuai artinya dapat dilakukan pengembangan kawasan permukiman dengan sentuhan teknologi namun, tetap harus diprioritaskan sebagai kawasan lindung. Sebagian besar lahan dengan kategori tidak sesuai merupakan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan rawan abrasi pantai.

Kata Kunci: Kesesuaian Lahan, Permukiman, Pesisir, *Analytical Hierarchy Process* (AHP), Kabupaten Takalar

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan untuk permukiman perlu diatur dengan baik, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan,

dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologis. Pergeseran fungsi yang terjadi di kawasan pesisir adalah lahan yang tadinya diperuntukkan sebagai daerah perlindungan

*Corresponding author. Tel.: +62-851-4518-4477
Jalan Poros Malino km. 6 Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan, Indonesia, 92711

setempat, berubah fungsi menjadi kawasan permukiman yang dapat menimbulkan ketidakteraturan suatu kawasan.

Kecamatan Galesong Utara memiliki laju perkembangan wilayah yang berlangsung cepat. Laju perkembangan Kecamatan Galesong Utara yang berlangsung cepat salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk sebesar 1,31% (BPS, 2017) yang berada diatas pertumbuhan penduduk Kabupaten Takalar yaitu 1,07% yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan wilayah akibat permintaan akan lahan meningkat sedangkan daya tampung lahan bersifat tetap. Berbicara mengenai daya tampung lahan, sampai kapanpun daya tampung lahan akan berkurang sedikit demi sedikit dikarenakan penambahan penduduk satu garis lurus dengan penambahan aktivitas sehingga menyebabkan kebutuhan lahan akan berkurang dengan adanya kegiatan membangun.

Kecamatan Galesong Utara merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan pesisir yang berada di Kabupaten Takalar, terletak dibagian sebelah utara Kabupaten Takalar dengan panjang garis pantai 9.912,3 meter (BPS, 2017). Apabila dilihat dari potensinya sebagai wilayah pesisir, Kecamatan Galesong Utara memiliki potensi pengembangan perikanan laut yang ditandai dengan adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba' di wilayah Desa Tamasaju dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Soreang yang berada di wilayah Desa Tamalate. Selain itu terdapat daerah wisata pantai, sebagian dataran rendah yang cukup subur untuk pertanian dan perkebunan (RTRW Kabupaten Takalar). Namun, Kecamatan Galesong Utara juga sempat mengalami abrasi pantai sehingga terjadi kerusakan pada garis pantai.

Perkembangan permukiman yang terjadi harus memperhatikan kondisi fisik lahannya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan berbagai pihak seperti degradasi lingkungan. Penempatan lokasi pembangunan permukiman perlu diselaraskan dengan kesesuaian lahannya sehingga, permasalahan jangka panjang dan dampak negatif yang mungkin terjadi dapat dihindari. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian

yaitu: 1) bagaimana tingkat kesesuaian lahan permukiman? dan 2) bagaimana prinsip-prinsip pengembangan permukiman berdasarkan kesesuaian lahannya?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dibagi menjadi wilayah makro yaitu Kabupaten Takalar dan mikro yaitu Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566,51km² dan terdiri dari 9 kecamatan (BPS, 2017). Sedangkan untuk wilayah mikro merupakan salah satu kecamatan dipesisir Kabupaten Takalar dengan luas 15,11 km² (BPS, 2017).

Teknik pengumpulan data primer diperoleh langsung dari wawancara, observasi dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari studi literatur/ telaah pustaka maupun instansi terkait.

Analisis yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan permukiman pesisir di lokasi penelitian yaitu analisis spasial (*overlay*) peta dengan menggabungkan paratemer/indikator dari beberapa studi literatur. Untuk menentukan pembobotan dari setiap parameter yang digunakan yaitu dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan bantuan *software expert choice* kemudian dilakukan analisis spasial (*overlay*) peta dengan bantuan *software ArcGIS 10.1*.

Responden kuesioner AHP berasal dari akademisi, pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya penentuan bobot dengan menggunakan metode perbandingan pasangan, perbandingan ini menggunakan metode Saaty (1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Fungsi Kawasan

Kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Takalar yang berada pada lokasi penelitian yaitu sempadan pantai, dan sempadan sungai. Berdasarkan Keppres Nomor 32 tahun 1990, sempadan pantai dan sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melindungi kawasan tersebut sehingga tidak digunakan sebagai lahan budidaya. Pengolahan ini menggunakan *analysis tool* berupa *buffering* sungai sejauh 50 m dan *buffering* garis pantai sejauh 100 m pada *software arcgis*.

Tabel 1. Fungsi kawasan di lokasi penelitian

No.	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Total Luas (ha)
1.	Kawasan lindung	188	1.542
2.	Kawasan budidaya	1.354	



Gambar 1. Peta fungsi kawasan di lokasi penelitian
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

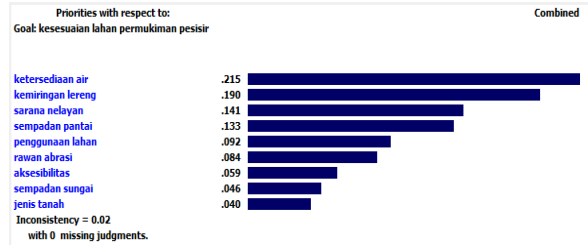
Analisis Kesesuaian Lahan

Dalam menentukan bobot dari masing-masing kriteria yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan permukiman pesisir menggunakan analisis AHP menggunakan *software expert choice*.

Tabel 2. Parameter kesesuaian lahan permukiman pesisir

No.	Parameter	Penilaian
1.	Kemiringan lereng	Kemiringan lereng berada pada kisaran lereng 0-8% dengan kategori datar.
2.	Jenis tanah	Pengelompokkan jenis tanah halus/kasar untuk mengidentifikasi tingkat kekuatan tanah dalam pembangunan permukiman.
3.	Penggunaan lahan	Ketersediaan lahan pembangunan untuk kawasan permukiman.
4.	Aksesibilitas	Jarak jalan terhadap lahan permukiman.
5.	Ketersediaan air	Daerah yang terlayani PDAM
6.	Sarana kenelayanan	Ketersediaan dan pencapaian terhadap permukiman.

No.	Parameter	Penilaian
7.	Rawan abrasi	Daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi ancaman abrasi
8.	Sempadan pantai	Bangunan yang tidak berada pada garis pantai.
9.	Sempadan sungai	Bangunan yang tidak berada pada garis sungai.



Gambar 2. Hasil olahan *software expert choice*

Dari hasil olahan menggunakan *software expert choice* dapat dilihat nilai *inconsistency* 0,02 sehingga dapat hasil perhitungan gabungan semua responden konsisten dalam menjawab kuesioner. Berdasarkan hasil gabungan responden maka diperoleh bobot dari setiap parameter kesesuaian lahan permukiman pesisir yang digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 3. Bobot dari setiap parameter

No	Parameter	Bobot (%)
1	Ketersediaan air	21,5
2	Kemiringan lereng	19
3	Sarana kenelayanan	14,1
4	Sempadan pantai	13,3
5	Penggunaan lahan	9,2
6	Rawan abrasi	8,4
7	Aksesibilitas	5,9
8	Sempadan sungai	4,6
9	Jenis tanah	4

Analisis kesesuaian lahan permukiman pesisir menggunakan analisis spasial (*overlay*) peta dan menggabungkan semua kriteria yang berpengaruh terhadap kesesuaian lahan permukiman di wilayah pesisir berdasarkan hasil kuesioner AHP yang telah dilakukan.

Kemiringan lereng sangat berpengaruh dalam kestabilan lahan, pada lereng yang curam sering terjadi longsor dan rawan terhadap erosi. Jika lahan mempunyai karakteristik demikian maka akan berbahaya bagi lokasi permukiman. Kemiringan lereng yang sangat sesuai untuk

kawasan permukiman yaitu 0-8% dengan kategori datar.

Tabel 3. Penilaian kriteria kemiringan lereng

Kisaran lereng	Kategori	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
0 – 8%	Datar	5	Sangat sesuai	19	0,95
8 –15%	Landai	3	Cukup sesuai	19	0,57
>15%	Curam	1	Tidak sesuai	19	0,19

Jenis tanah yang cocok untuk kawasan permukiman ialah alluvial. Jenis tanah yang terdapat pada lokasi penelitian hanya terdiri dari satu jenis tanah saja berdasarkan data shapefile RTRW Kabupaten Takalar yaitu inceptisol. Jenis tanah inceptisol termasuk kedalam jenis tanah andosol, gleihumus dan alluvial yang banyak terdapat pada dataran pantai atau aliran sungai. Jenis tanah inceptisol menyebar mulai di lingkungan iklim kering sampai lembab.

Tabel 4. Penilaian kriteria jenis tanah

Jenis tanah	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
Inceptisol	5	Sangat sesuai	4	0,2
Ultisol	3	Cukup sesuai	4	0,12
regosol	1	Tidak sesuai	4	0,04

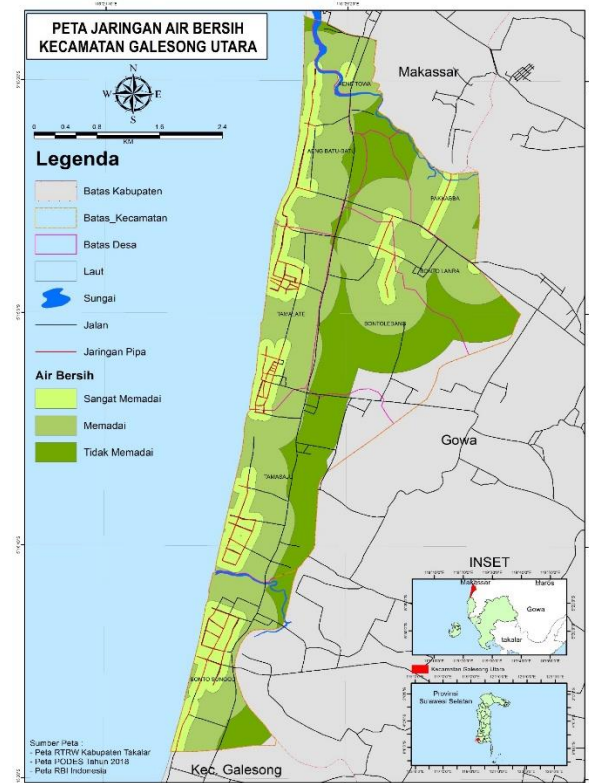
Penentuan kriteria analisis ketersediaan air bersih dilokasi penelitian berdasarkan jaringan per-pipaian air PDAM yang tersedia. Pada lokasi penelitian dalam hal pengadaan air bersih dipenuhi melalui dua cara yaitu PDAM dan non PAM. PDAM memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai karena air yang berada pada wilayah pesisir sudah tercemar dengan air laut (payau). Bagi masyarakat yang belum teraliri jaringan air PDAM, memperoleh air bersih dengan memanfaatkan sumur bor atau membuat sambungan pipa PDAM yang mencakup lahan radius pelayanan PDAM.

Tabel 5. Luas yang terlayani air bersih di lokasi penelitian

No.	Jarak pipa utama terhadap permukiman (m)	Luas yang terlayani (ha)
1	<100	294
2	100 – 500	745
3	>500	503
Jumlah		1542

Tabel 6. Klasifikasi jaringan pipa air bersih PDAM

Kriteria	Jarak pipa terhadap lahan	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
Sangat memadai	<100m	5	Sangat sesuai	21,5	1,07
Memadai	100-500m	3	Cukup sesuai	21,5	0,64
Kurang memadai	>500m	1	Tidak sesuai	21,5	0,215



Gambar 3. Peta *buffer* jaringan pipa PDAM
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Analisis aspek aksesibilitas dilakukan dengan analisis *tool* berupa *buffering* peta jaringan jalan sebagai bentuk aksesibilitas. Jaringan jalan arteri dan kolektor dijadikan sebagai dasar analisis karena memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi. Namun, dikarenakan tidak adanya jalan arteri yang melintasi lokasi penelitian, maka jaringan jalan yang digunakan hanya jaringan jalan kolektor saja.

Tabel 7. Luas lahan dari jalan kolektor terhadap permukiman di lokasi penelitian

No.	Jarak jalan utama terhadap permukiman (m)	Luas lahan (ha)
1	<500	856
2	500 – 1000	396
3	>1000	290
Jumlah		1542

Tabel 8. Klasifikasi jaringan jalan kolektor

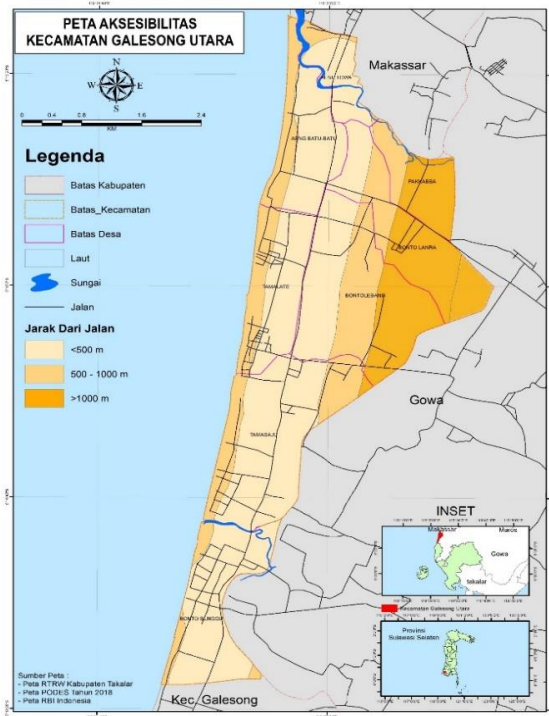
Kriteria	Jarak pipa terhadap lahan	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
Sangat dekat	<500m	5	Sangat sesuai	5,9	0,29
Dekat	500-1000m	3	Cukup sesuai	5,9	0,17
Jauh	>1000m	1	Tidak sesuai	5,9	0,059

Tabel 9. Jumlah rumah yang terkena dampak abrasi pantai

No.	Desa	Radius (m)	Rumah yang terkena dampak abrasi
1	Aeng batu-batu	20	25
2	Tamalate	25	35
3	Tamasaju	20	25
4	Bontosunggu	20	25
Jumlah			110

Tabel 10. Klasifikasi rawan abrasi di lokasi penelitian

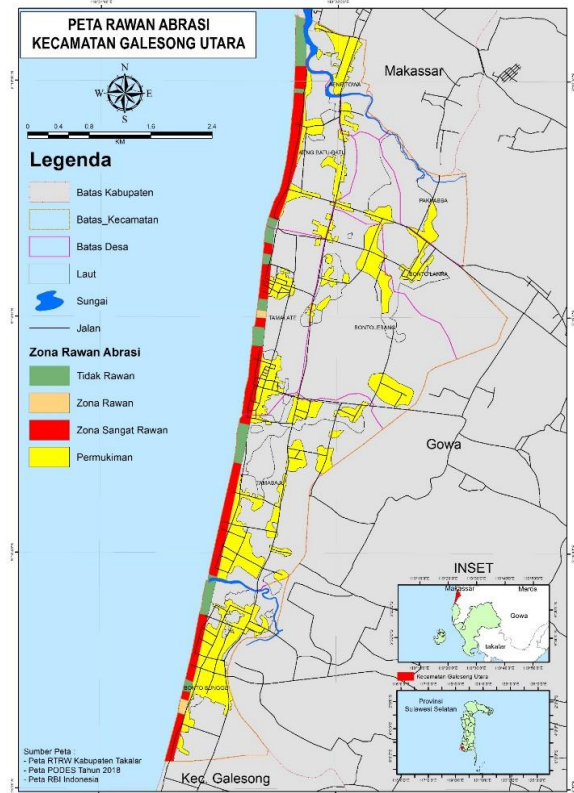
Kriteria	Radius (m)	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
Tidak rawan	>100	5	Sangat sesuai	8,4	0,42
Rawan	50-100	3	Cukup sesuai	8,4	0,25
Sangat rawan	<50	1	Tidak sesuai	8,4	0,084



Gambar 4. Peta *buffer* jalan utama
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Pada parameter kerawanan bencana hanya dibatasi yaitu rawan abrasi pantai saja dengan pertimbangan abrasi pantai sering terjadi pada lokasi penelitian setiap tahunnya. Pertimbangan dalam penentuan nilai yaitu kawasan peruntukan permukiman tidak berada pada daerah rawan bencana yang tertuang dalam permen PU No 41 tahun 2007. Selanjutnya analisis pada tahap ini menetapkan bahwa kawasan permukiman harus berada diluar daerah rawan bencana, terutama bahaya tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi (PP No. 26 Tahun 2008).

Pada lokasi penelitian desa dengan tingkat rawan abrasi pantai yaitu desa yang berada dipesisir pantai seperti Desa Aeng Batu-batu, Desa Tamalate, Desa Tamasaju dan Desa Bontosunggu.



Gambar 5. Peta rawan bencana abrasi
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Selanjutnya, kriteria yang digunakan dalam radius pencapaian sarana nelayan yaitu 400 meter jarak ideal jangkauan pejalan kaki berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan dan permukiman (gambar 6).

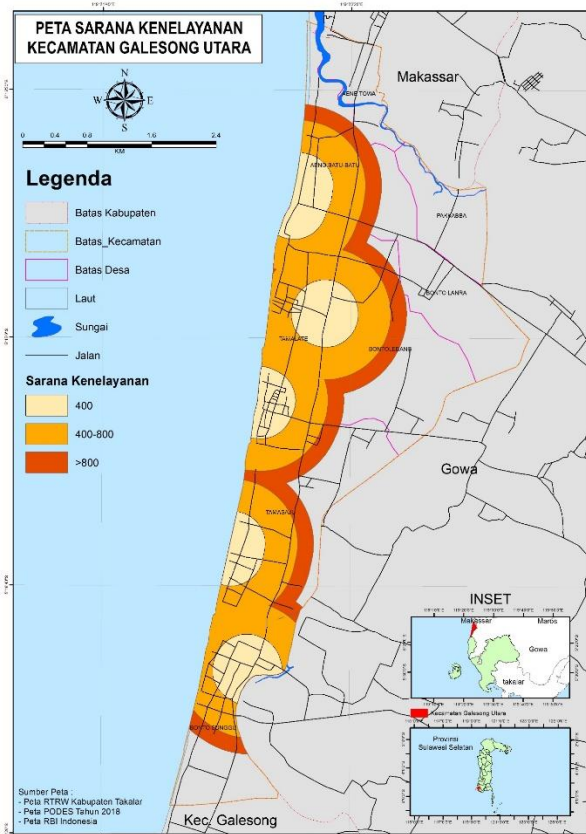
Tabel 11. Luas keterjangkauan sarana nelayan

No.	Radius (m)	Luas yang terjangkau (ha)
1	<400	214
2	400 – 800	447
3	>800	881
Jumlah		1542

Pada lokasi penelitian sarana kenelayanan letaknya menyebar pada tiap desa yaitu Desa Tamalate terdapat TPI Soreang dan dermaga, Desa Tamasaju terdapat PPI Beba' dan dermaga, Kelurahan Bontolebang dan Desa Bontosunggu terdapat pabrik es balok, serta Desa Aeng Batu-batu terdapat SPBN Pantai Bantu-batu fan bengkel perahu.

Dari hasil *buffering* menunjukkan kawasan yang terjangkau dengan sarana kenelayanan yaitu hampir di seluruh desa yang berada dipesisir pantai Kecamatan Galesong Utara seperti Desa Aeng batu-batu, Desa Tamalate, Desa Tamasaju, dan Desa Bontosunggu. Sedangkan kawasan yang tidak terjangkau berada jauh dari pesisir pantai yaitu Desa Pakabba, Desa Bontolanra, dan Desa Bontolebang.

Pada lokasi penelitian hanya sebagian desa yang mempertimbangkan sempadan pantai untuk aktifitas sehari-hari. Ada beberapa permukiman yang melewati sempadan pantai sehingga mengubah garis pantai yang ada (gambar 7).



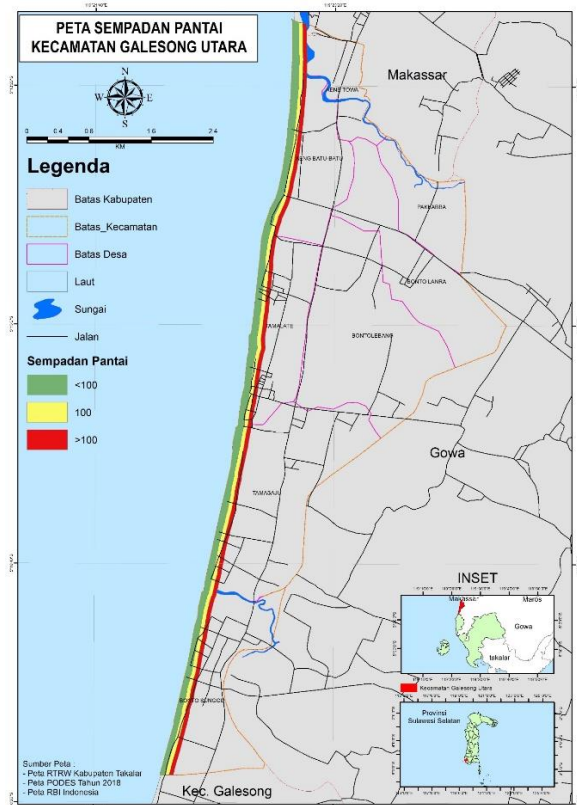
Gambar 6. Peta radius sarana nelayan
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Tabel 12. Klasifikasi sarana kenelayanan

Kriteria	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
Sangat terjangkau	5	Sangat sesuai	14,1	0,70
Terjangkau	3	Cukup sesuai	14,1	0,42
Tidak terjangkau	1	Tidak sesuai	14,1	0,141

Tabel 13. Jumlah rumah yang melewati sempadan pantai

No.	Desa	Radius (m)
1	Aeng batu-batu	512
2	Tamalate	436
3	Tamasaju	283
4	Bontosunggu	231
Jumlah		1462



Gambar 7. Peta sempadan pantai
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Tabel 14. Klasifikasi sempadan pantai

Kriteria	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
>100 m	5	Sangat sesuai	13,3	0,66
100 m	3	Cukup sesuai	13,3	0,39
<100 m	1	Tidak sesuai	13,3	0,133

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Tabel 15. Jumlah rumah yang melewati sempadan sungai

No.	Desa	Rumah
1	Aeng batu-batu	23
2	Aeng Towa	67
3	Tamasaju	13
Jumlah		103

Tabel 16. Klasifikasi sempadan sungai

Kriteria	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
>50 m	5	Sangat sesuai	4,6	0,23
50 m	3	Cukup sesuai	4,6	0,13
<50 m	1	Tidak sesuai	4,6	0,046

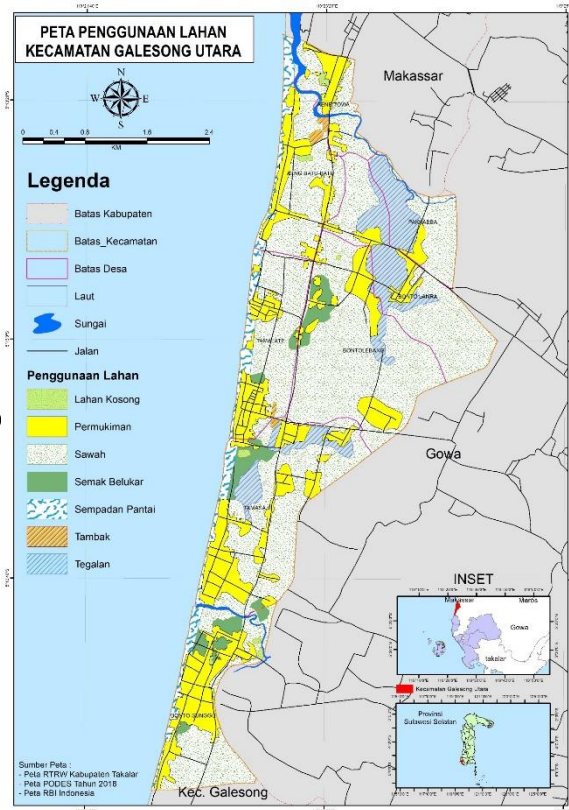
Ketersediaan lahan menjadi hal penting untuk penentuan pengembangan kawasan permukiman yang sesuai. Lahan yang menjadi prioritas adalah lahan yang tersedia untuk dikembangkan, berdasarkan pada penggunaan lahan di lokasi eksisting yaitu: kawasan tersebut belum terbangun untuk kawasan permukiman dan kawasan permukiman pada pola ruang. Secara kuantitatif pada peta penggunaan lahan di Kecamatan Galesong Utara yaitu 88% merupakan kawasan budidaya dan 12% untuk kawasan lindung, dimana menunjukkan kawasan budidaya sebagian besar diperuntukkan untuk kawasan permukiman dan sawah (gambar 8).

Tabel 17. Penggunaan Lahan di Lokasi Penelitian

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1.	Tambak	6
2.	Semak belukar	54
3.	Sawah	931
4.	Tegalan/ ladang	129
5.	Permukiman	293
6.	Lahan kosong	7
7.	Sempadan pantai	122
Jumlah		1542

Tabel 18. Klasifikasi penggunaan lahan

Kriteria	Nilai	Kelas	Bobot (%)	Skor (bobot x nilai)
Lahan kosong/ belukar	5	Sangat sesuai	9,2	0,46
Tambak, tegalan dan sawah	3	Cukup sesuai	9,2	0,27
Sempadan pantai/ kawasan lindung	1	Tidak sesuai	9,2	0,092



Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Parameter yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan permukiman pesisir diberikan nilai dan bobot dari hasil analisis AHP lalu dikalikan sehingga akan didapatkan kisaran skor yang menentukan kelas kesesuaian lahan permukiman pesisir. Untuk skor maksimum dan minimum kesesuaian lahan (tabel 19).

Tabel 19. Total skor kesesuaian lahan permukiman pesisir

Indikator	Bobot (%)	Nilai Min.	Skor min (Bobot x Nilai min)	Nilai Maks	Skor maks. (Bobot x Nilai maks)
Ketersediaan Air	21,5	1	0,215	5	1,075
Kemiringan	19	1	0,19	5	0,95

Indikator	Bobot (%)	Nilai Min.	Skor min (Bobot x Nilai min)	Nilai Maks	Skor maks. (Bobot x Nilai maks)
Lereng					
Sarana Nelayan	14,1	1	0,141	5	0,705
Sempadan Pantai	13,3	1	0,133	5	0,665
Penggunaan Lahan	9,2	1	0,092	5	0,46
Rawan Abrasi	8,4	1	0,084	5	0,42
Aksesibilitas	5,9	1	0,059	5	0,295
Sempadan Sungai	4,6	1	0,046	5	0,23
Jenis Tanah	4	1	0,04	5	0,2
Jumlah			1		5

Setelah mendapatkan skor minimal dan skor maksimal selanjutnya mencari interval kelas kesesuaian lahan permukiman pesisir dengan menggunakan metode aritmatika. Dengan rumus sebagai berikut

$$IK = Range / K$$

$$IK = 5 - 1 / 3$$

$$IK = 1,3333$$

Keterangan :

- IK = Interval Kelas
- Range = Skor maksimum - Skor minimum
- K = Banyaknya kelas yang diinginkan

Dari perhitungan diatas maka diperoleh interval kelas kesesuaian lahan permukiman yaitu 1,3333 dan klasifikasi kesesuaian lahan permukiman terbagi tiga kelas (tabel 20).

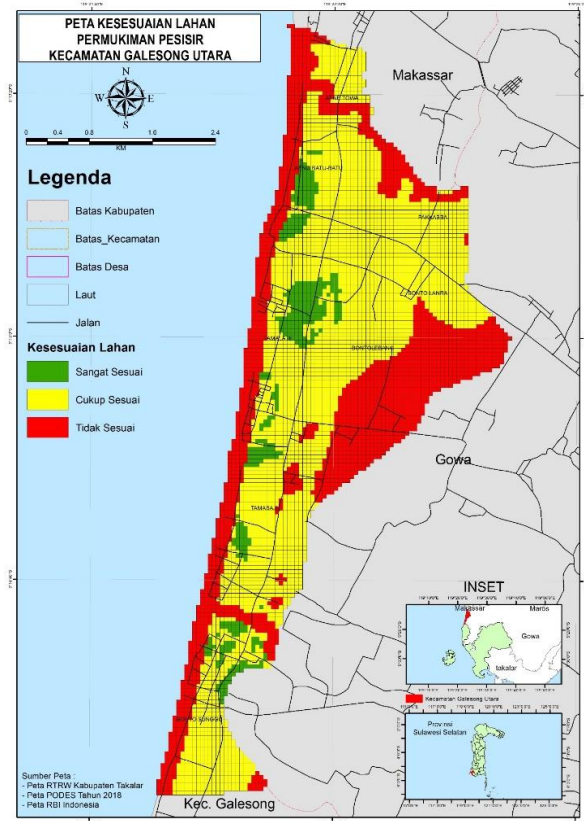
Tabel 20. Kelas kesesuaian lahan permukiman pesisir

No.	Klasifikasi	Interval Kelas
1	Sangat sesuai	3,67 – 5
2	Cukup sesuai	2,33 – 3,66
3	Tidak sesuai	1 – 2,32

Penggabungan indikator dilakukan dengan menggunakan aplikasi Arcgis dengan analisis overlay untuk memperoleh hasil dari kesesuaian lahan (gambar 9).

Tabel 21. Kesesuaian lahan permukiman pesisir di Kecamatan Galesong Utara

No.	Kelas Kesesuaian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sesuai	110	7
2	Cukup sesuai	939	61
3	Tidak sesuai	493	32
Jumlah		1542	100



Gambar 9. Peta grid kesesuaian lahan permukiman pesisir
Sumber: RTRW Takalar dimodifikasi oleh penulis, 2018

Prinsip Pengembangan Permukiman Pesisir

Untuk kawasan rawan abrasi antara lain, pembuatan tanggul pemecah ombak, memperhatikan garis sempadan pantai yang sesuai yaitu >100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat, dan memperhatikan ekosistem alami pesisir yang berperan sebagai penahan abrasi seperti mangrove dan terumbu karang.

Selanjutnya, untuk kawasan sempadan pantai, yaitu penegasan dan sosialisasi terhadap undang-undang terkait garis sempadan pantai yaitu minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Untuk sarana kenelayan, yaitu pembangunan sarana nelayan tidak mengganggu fungsi garis sempadan pantai dan sesuai dengan perda yang ditetapkan, serta keberadaan sarana nelayan harus saling menunjang satu sama lain.

Untuk air bersih, yaitu pembuatan sumur infiltrasi disepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin, sumber air bersih yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup, untuk air PDAM suplai air 60-100 liter/orang/hari, dan prasana air bersih harus

memenuhi persyaratan bau, rasa dan warna. Untuk aksesibilitas, yaitu kawasan peruntukkan permukiman terjangkau oleh transportasi umum dan prasarana jalan harus sesuai dengan SNI yang berlaku.

Selanjutnya untuk ketersediaan lahan, yaitu: 1) kawasan permukiman pesisir harus memanfaatkan sumberdaya pesisir pantai dan kelautan yang produktif untuk menjaga ekosistem; 2) tidak mengganggu fungsi lindung yang ada; 3) penetapan lokasi kawasan nelayan berdasarkan kriteria kelayakan teknis; dan 4) memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukkan permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam.

Terakhir, untuk kawasan sempadan sungai, yaitu penetapan lebar sempadan sungai sebagai peyanga kelestarian fungsi sungai yaitu >50 meter dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu garis sempadan sungai.

KESIMPULAN

Kesesuaian lahan permukiman di wilayah pesisir Kecamatan Galesong Utara berdasarkan parameter yang digunakan yaitu sempadan pantai, rawan abrasi, sarana kenelayan, ketersediaan air bersih, aksesibilitas, sempadan sungai, kemiringan lereng, jenis tanah dan ketersediaan lahan menggunakan metode AHP dan *overlay* peta menghasilkan tiga kelas kesesuaian lahan permukiman di wilayah pesisir yaitu klasifikasi sangat sesuai adalah 110 hektar, cukup sesuai 939 hektar dan tidak sesuai 493 hektar.

Prinsip pengembangan permukiman di wilayah pesisir berdasarkan tingkat kesesuaian lahan yaitu pembuatan tanggul pemecah ombak, pembangunan sarana nelayan tidak mengganggu fungsi garis sempadan pantai dan keberadaan sarana nelayan harus saling menunjang satu sama lain. Pembuatan sumur filtrasi untuk kualitas air tanah yang payau, sumber air bersih harus memenuhi syarat bau, rasa dan warna. Kawasan peruntukkan permukiman harus memiliki prasarana jalan yang terjangkau transportasi umum dan sesuai dengan SNI yang berlaku. Ketersediaan lahan permukiman tidak berada pada kawasan lindung, penetapan lokasi berdasarkan kriteria

kelayakan teknis dan memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim. Memanfaatkan sumberdaya pesisir pantai dan kelautan yang produktif untuk menjaga ekosistem. Penetapan wilayah sempadan sungai sebagai peyanga kelestarian fungsi sungai yaitu >50 meter dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu garis sempadan sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Baja, Sumbangan (2012). *Buku Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah – Pendekatan Spasial dan Aplikasinya*. Yogyakarta.
- Dahuri, R. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Eka, Windi dkk (2015). *Penentuan Kesesuaian Lahan Permukiman di Kabupaten Jember Dengan Menggunakan Metode AHP*. Jurnal Sistem Komputer Vol. 5 No. 2. ISSN: 2087-4685, e-ISSN: 2252-3456 Web: <https://bit.ly/35oj2FW> (akses terakhir 6 Juli 2019).
- Fauzi, Yulian (2009). *Analisis Kesesuaian Lahan Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Melalui Perancangan Model Spasial dan SIG*. Universitas Bengkulu. Web: <https://bit.ly/2Fo76cW> (akses terakhir 6 Juli 2019).
- Taufiqurrahman (2015). *Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Pesisir Kota Pekalongan*. Semarang, Tesis Universitas Diponegoro Semarang. Web: <https://bit.ly/2STyUhe> (akses terakhir 6 Juli 2019).
- Presiden Republik Indonesia (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*. Website: <http://www.bphn.go.id/data/documents/90kp032.pdf> (akses terakhir 6 Juli 2019).
- Menteri Pekerjaan Umum (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya*. Web: <https://bit.ly/2ukg6gQ> (akses terakhir 6 Juli 2019).
- Menteri Negara Perumahan Rakyat. 2006. *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan*. URL: <https://bit.ly/2ucVWVQ> (akses terakhir 6 Juli 2019).
- Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2004). SNI 03-1773-2004 tentang *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Website: <https://bit.ly/2ZPVXSX> (akses terakhir 29 Juli 2019).
- Pemerintah Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Web: <https://bit.ly/2FkCJnx> (akses terakhir 30 Juli 2019).